
Rekontruksi Industrialisasi Guna Mewujudkan Kemandirian Indonesia

Oleh :

Sigit Sardjono

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

In the globalization era nowadays, the increase of interdependence among the states becomes unavoidable. But, this dependence has to be minimized a little by little. It makes what to do limited. The imported product dependence makes goods price more expensive. Meanwhile, the map of economy and business world atmosphere is colored with increasingly higher competence. All of them effect no option for us, except increase ability and superiority of all national economic potency in order to achieve the continuous national development. In welcoming the commitment explanation, it is time to reinforce the strategy for building the industry sector by featuring our own strength to increase independence in implementing the national development. It can especially be personified by eliminating the problems in the sector. The most important thing is also to increase nationalism sense. The new nationalism is not chauvinism and isolated nationalism, but nationalism for domestic product appreciation rather than imported product. Although the action for constructing industrialization is slow, but it is better to be late than not at all.

Keywords: Industrial, Development, Oligopoly, Nasionalism

Pendahuluan

Umum

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki “dasar tukar” (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Kelebihan sektor industri sebagaimana yang dipaparkan tadi, maka industrialisasi dianggap sebagai obat mujarab (panacea) untuk mengatasi masalah ekonomi di negara-negara berkembang. Kebijakan yang ditempuh seringkali dipaksakan, dalam arti hanya sekedar meniru pola kebijakan pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti masalah ketersediaan bahan mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga-kerja, kecukupan modal, dan sebagainya. Atas dasar itu, tidaklah mengherankan jika sebagian negara miskin beranggapan bahwa pengembangan sektor industri merupakan obat yang sangat ampuh untuk memperbaiki keadaan mereka.

Sedikit sekali negara-negara berkembang yang menyadari, bahwa usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lain, terutama sektor pertanian. Sesungguhnya adalah naif untuk memilih salah satu saja di antaranya. Kedua sektor tersebut justru berkaitan sangat erat. Sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh sektor industri, baik sebagai penyedia masukan maupun sebagai pasar bagi produk-produk industri. Setiap peningkatan daya beli petani akan merupakan rangsangan bagi pembangunan sektor industri pula. Jadi, kelancaran program industrialisasi sebetulnya tergantung pula pada perbaikan perbaikan di sektor-sektor lain, dan seberapa jauh perbaikan yang dilakukan mampu mengarahkan dan bertindak sebagai pendorong bagi kemunculan industri-industri baru. Dengan cara demikian kebijakan yang ditempuh akan dapat mewujudkan mekanisme saling dukung antar sektor.

Aneh rasanya bahwa 64 tahun setelah kita merdeka kita merasa belum mandiri. Bagaimana tidak, Negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri.

Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat sebagai pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal. Ikan kita, dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan milyaran dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita, dicuri dengan nilai kerugian yang milyaran dollar AS. Kondisi seperti itu masih ditambah semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman bagi perekonomian kita tidak ada sikap sedikit saja untuk mandiri tanpa investor asing, yang kenyataannya investor itu tukang tipu.

Sektor Industri yang dulu kita harapkan mampu bertindak sebagai Leading Sector, dalam kenyataan sekarang industri-industri itu hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia. Dalam tulisan ini penulis menggunakan alur pikir sebagai berikut, dalam kenyataannya ekspor Indonesia dari tahun ketahun merosot. Berbagai sebab dari kemerosotan ekspor diantaranya penyebabnya adanya krisis ekonomi dan keuangan. Sebab lain munculnya negara-negara pesaing baru diantaranya China; Thailand; Vietnam; Malaysia yang cukup signifikan. Banyak negara tujuan ekspor yang mengalihkan pembeliannya pada negara pesaing. Alasannya harga dari produk Indonesia kurang kompetitif. Ketidak kompetitifan harga produk Indonesia banyak penyebabnya dinataranya kondisi infrastruktur; high cost economy; suku bunga yang tidak kompetitif. Dalam kondisi seperti ini dalam jangka pendek pelaku bisnis di Indonesia mencari pasar ekspor yang baru dan mengalihkan ke pasar domestik. Diyakini pasar domestik di Indonesia cukup besar dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa menjadi peluang pasar yang cukup besar. Dua cara inipun tidak bisa semudah yang kita perkirakan. Masih ada kendala, cita rasa, design dan jenis produk tidak bisa demikian saja dialihkan dari Eropa ke Timur Tengah. Pasar domestik daya beli konsumen domestik menurun akibat adanya krisis. Selain itu banyaknya perusahaan besar yang berada pada konsentrasi pasar oligopolitik dan monopolistik yang membuat kedrugian pada konsumen dan buruh. Dibalik itu bentuk UKM yang diyakini dapat sebagai pendukung perekonomian berada pada pasar persaingan sempurna. Alasan itu penulis membatasi fokus pembahasan bagaimana membangun kembali (Rekontruksi Industrialisasi) agar Indonesia mandiri.

Deindustrialisasi

Yang dimaksud dengan deindustrialisasi adalah menurunnya peran industri dalam perekonomian secara menyeluruh. Sementara itu, deindustrialisasi bagi suatu negara lebih merupakan masalah daripada sesuatu yang diharapkan. Menurunnya peranan industri dalam perekonomian bisa dilihat dan berbagai sisi, misalnya turunnya pekerja di sektor industri, turunnya produk industri, serta turunnya sektor industri dibandingkan sektor lain. Penyebab dan deindustrialisasi ini bisa karena adanya perubahan pola spesialisasi internasional. Jika suatu negara menemukan sumber alam baru dan relatif besar cadangannya, maka kegiatan eksploitasi sumber alam tersebut akan meningkat pesat, dan sektor industri akan menurun. Penyebab lain deindustrialisasi adalah hilangnya keunggulan kompetitif dan sektor industri suatu negara. Jika keunggulan kompetitif produk industri suatu negara hilang, maka produk negara tersebut akan kalah di pasar internasional. Implikasinya, industri negara akan menurun dan pada akhirnya membuat investor menarik investasinya dan sektor industri ke sektor lain atau bahkan ke negara lain. Gejala deindustrialisasi yang mencuat dalam perekonomian nasional Indonesia sejak pergantian milenium yang lalu kini sesungguhnya telah sampai pada perwujudannya secara sangat konkret. Secara pragmatik, deindustrialisasi memiliki pertautan erat dengan industrialisasi. Hal ini karena, deindustrialisasi merupakan antitesis dari industrialisasi. Deindustrialisasi merupakan proses lebih lanjut dari industrialisasi pada tingkat perkembangan tertentu yang acapkali mengkhawatirkan. Jika industri manufaktur kian meningkat kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Kenyataan ini yang terjadi, maka suatu negara diidentifikasi tengah berada dalam taraf industrialisasi. Dengan demikian, industrialisasi memiliki matra dan kinerja yang sangat konkret. Konsekuensinya, tak ada industrialisasi manakala industri manufaktur tak memiliki kontribusi secara signifikan terhadap PDB.

Sebaliknya, jika ternyata kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan secara relatif dibandingkan sektor perekonomian yang lain, serta-merta industrialisasi memasuki fase titik balik. Ini berarti, perekonomian sebuah negara memasuki fase deindustrialisasi. Dalam peristilahan yang sangat populer, deindustrialisasi dilukiskan sebagai *the decline in the contribution made by manufacturing industry to a nation's overall economic prosperity*. Deindustrialisasi adalah kenyataan yang sangat keras tatkala industri manufaktur sudah tak lagi mampu berperan sebagai basis terciptanya kemakmuran suatu bangsa. Pengangguran lalu tampil sebagai realitas paling mengerikan dari deindustrialisasi, yaitu akibat kian lumpuhnya

industri manufaktur berperan sebagai penyedia lapangan kerja. Apa yang penting diungkapkan di sini adalah: Setiap negara sesungguhnya rentan terhadap ancaman deindustrialisasi.

Deindustrialisasi menjadi pertanda adanya perkembangan lebih lanjut perekonomian ke arah pasca-industri. Inilah yang kemudian dikenal sebagai kemunculan industri tersier. Tercermin pada munculnya hi-tech intensive industry oleh menguatnya *knowledge economy* sebagai penentu kecenderungan. Deindustrialisasi dalam pengertian yang demikian berada dalam aras *economy moves away from the manufacture of goods and towards the provision of services*. Dari sini tak terelakkan lahirnya dua kesimpulan, bahwa deindustrialisasi bisa berarti positif namun bisa pula berarti negatif.

Permasalahan pada Industri Indonesia

Jika kita mengikuti perkembangan ekspor Indonesia, belakangan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ada beberapa faktor yang dituding sebagai biang keladi penyebab utama menurunnya ekspor adalah menurunnya permintaan di negara-negara tujuan ekspor. Turunnya permintaan dari negara-negara tujuan disebabkan adanya krisis financial. Krisis financial global menyebabkan turunnya permintaan berasal dari Negara AS; Jepang dan Eropa. Krisis juga menyebabkan turunnya ekspor negara China; Vietnam; Thailand dan Jepang. Akibatnya negara-negara itu mengalihkan sebagian eksportnya ke Indonesia, bisa kita bayangkan, himpitan hasil produk Indonesia, bagai sudah jatuh tertimpa tangga. Sederet pertanyaan yang mirip bisa muncul pada hasil industri Indonesia, kualitasnya kurang baik; modelnya dan harganya. Oleh karena itu industri Indonesia harus di buat efisien dan competitive. Untuk membuat hasil industri yang efisien dan competitive harus dilakukan suatu tindakan yang komprehensif dengan merekonstruksi industri Indonesia. Merekonstruksi industri Indonesia bisa lebih tepat jika bisa melihat permasalahan pada industri Indonesia.

Permasalahan pada industri Indonesia adalah;

1. Tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan pada pasar yang diproteksi. Tingginya tingkat konsentrasi ini mengakibatkan kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang berorientasi dalam kondisi mendelkantai monopoli, setidaknya oligopoli. Ini terbukti dari 50 persen lebih subsektor industri memiliki indeks konsentrasi 4 perusahaan (CR4)

lebih dari 70 persen. Selain itu, bentuk yang mendekati monopoli ini membuat produsen menetapkan harga yang lebih wajar, dengan melakukan transfer pricing. Berbeda dengan IB, IK menghadapi pasar yang berbentuk mendekati persaingan sempurna.

2. Lemahnya hubungan mitra industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialisasi yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. Belum terintegrasinya UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar.
3. Struktur industri Indonesia masih dangkal, masih tingginya kandungan import bahan baku,
bahan antara dan komponen untuk seluruh industri berkisar 28 – 32 persen dengan minimnya sektor industri menengah. Tidak terbangunnya link antar sektor ekonomi dan tidak terjadinya mata rantai industri hulu dan hilir menyebabkan industri manufaktur masih ketergantungan dengan luar negeri.
4. Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyaknya yang bertipe tukang jahit dan tukang rakit.
5. Masih rendahnya efisiensi yang berkaitan dengan proses produksi
6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja industri.

Peluang dan Strategi Pembangunan

Asia Pusat Pertumbuhan

Abad ke-21 adalah abad milik Asia. Pada tahun 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia bakal dikuasai Asia. China, menggusur Amerika Serikat, akan menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India di posisi ketiga. Lalu, apa peran dan di mana posisi Indonesia waktu itu?. China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan sejumlah parameter saat ini dan prediksi ke depan, sudah jelas adalah pemenang dalam medan pertarungan terbuka dunia di era globalisasi, di mana tidak ada lagi sekat-sekat bukan saja bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, tetapi juga ideologi dan nasionalisme negara.

Asia yang di masa lalu sekedar dikenal sebagai sumber bahan baku mentah, lalu semakin maju dan dikenal sebagai tempat penyelenggaraan workshop, seminar, dan konferensi ilmu pengetahuan, sekarang sedang giat membangun berbagai laboratorium pengembangan sains yang sesungguhnya. Dengan dukungan pembiayaan Pemerintah, banyak fasilitas riset canggih, dibangun, dan bersamaan dengan itu, intensif mencari dan mengembangkan anak-anak mudanya yang memiliki talenta unggul. Ditambah kebebasan dari pembatasan aturan hukum atas riset kontroversial (seperti riset kloning), Asia sedang dalam perjalanan revolusi sains yang dapat mengancam dominasi barat sebagai inovator teknologi.

Indonesia sepatutnya memberi andil yang signifikan dalam tampilnya Asia sebagai pusat perekonomian dunia, mengingat modal amat besar yang kita miliki, berupa sumber daya alam, luas wilayah laut dan daratan dan jumlah penduduk. Kondisi kemunduran dan ketertinggalan yang dialami Indonesia sekarang telah mengundang kegamangan akan hari depan Indonesia. Sebaliknya, National Intelligence Council, organ Pemerintah Amerika Serikat (AS), yang pada tahun 2005 mengekspos kajian “Rising Powers: The Changing Geopolitical Landscape 2020? meramalkan bahwa di tahun 2020 Indonesia bersama China, India, Afrika Selatan dan Brazilia, adalah negara-negara yang pengaruhnya semakin meningkat. Syaratnya, ekonomi Indonesia tumbuh 6-7 persen per tahun selama satu setengah dekade mendatang, dengan populasi sekitar 250 juta jiwa. Dari sisi populasi, Indonesia juga perlu memanfaatkan “bonus demografi? setelah tahun 2015 selama satu generasi. Pada masa itu, age dependency ratio, yaitu proporsi penduduk muda dan tua terhadap penduduk usia kerja menurun, yang kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan PDB

Negara	2008	2009	2010
Jepang	-0.6	-6.2	0.5
Korsel	2.2	-4.0	1.5
China	9.0	6.5	7.5
India	7.3	4.5	5.8
Indonesia	6.1	2.5	3.5
Malaysia	4.6	-3.5	1.3
Thailand	2.6	-3.0	1.0
Vietnam	6.2	3.3	4.0

Sumber WEO

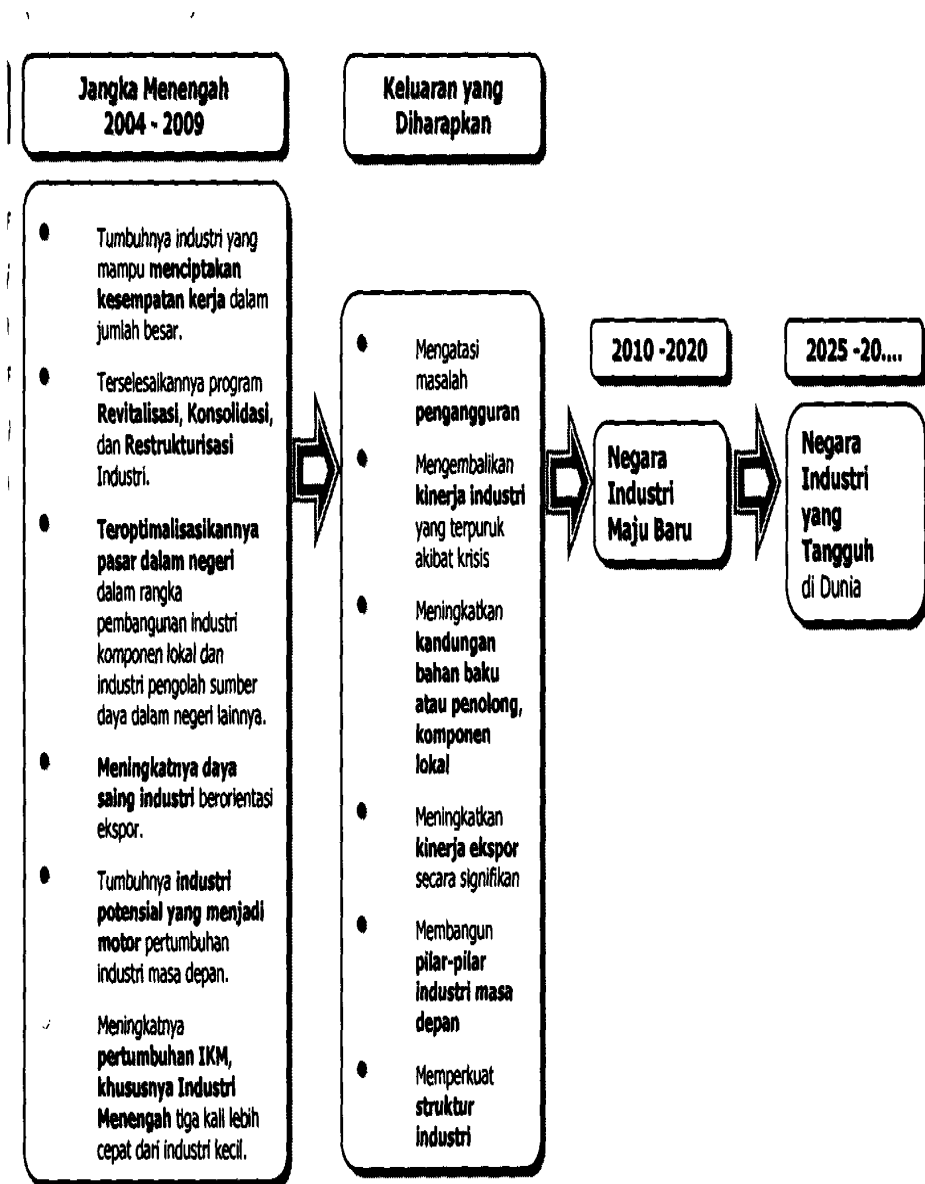
Strategi Industri

Dibalik kemajuan-kemajuan yang telah berhasil kita raih, masih banyak lagi yang harus kita kejar. Terutama dalam usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang seadil-adilnya sebagai salah satu tujuan pokok kemerdekaan. Dalam hal ini kita sadari, bahwa agak jauh kita tertinggal. Sebabnya antara lain karena dan 64 tahun masa merdeka itu sebenarnya waktu yang sungguh sungguh tidak dimanfaatkan untuk membangun ekonomi negara dan ekonomi rakyat, kita terlalu disibukkan oleh usaha konsolidasi kita sebagai bangsa, yang merupakan suatu tahapan yang tidak dapat dihindari, suatu proses pendewasaan, dimana di dalamnya tercakup proses kristalisasi ideologis. Maka dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya yang lahir bersama-sama atau sesudah kita, kita ketinggalan dalam bidang penibangunan ekonomi. Globalisasi seperti angin tidak dapat dihentikan, begitu pula era perdagangan bebas. Persoalnya, siapkah negeri ini bersaing, dapatkah industrinya memanfaatkan perdagangan bebas? Sebab, jika tidak dapat bersaing dalam kualitas dan produktivitas, sistem perdagangan bebas akan menggilas perindustrian negeri ini. Daya saing menjadi kata kunci untuk memasuki pasar global. Untuk itu, Indonesia harus pandai-pandai menetapkan pilihan untuk membangun dan mengembangkan industrinya. Industri Indonesia harus melakukan transformasi. Dan industri berteknologi rendah menuju teknologi tinggi. dengan produk kualitas tinggi. Membuat diversifikasi hingga ke produk hilir yang paling *so-phisticated* (canggih) dan berpijak pada sumber daya alam yang menjadi keunggulan Indonesia, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.

Hill (1997: 18), guru besar Australian National University, tegas mengatakan bahwa Indonesia menempuh kebijakan intervensi industri yang salah arah. Alasannya, sektor perusahaan besar milik negara secara tidak efisien menggunakan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan dengan lebih produktif di tempat lain; komitmen yang besar terhadap industri berteknologi tinggi (walaupun tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan), sementara perluasan industri-industri dasar dan jasa jasa pendukung mengalami kekurangan sumber daya; sistem peraturan dan perizirian yang berbelit-belit dan seolah-olah dirancang untuk mencapai tujuan nasional; serta program pengembangan perusahaan-perusahaan kecil dan program subkontrak yang diwajibkan selama lebih dan 20 tahun telah mengakibatkan dampak yang kecil dalam efisiensi atau pemerataan.

Selama pemerintahan Orde Baru kebijakan industri di formulasikan ke dalam Repelita, yang menitik beratkan pada: (1). Industri-industri yang menghasilkan devisa dengan cara memproduksi barang-barang substitusi impor; (2) industri-industri yang memproses bahan mentah (industri dasar) dalam negeri dalam jumlah besar; (3) industri-industri padat karya; serta (4) perusahaan negara untuk tujuan strategis dan politis (prawiro, 1998). Dalam masa pemerintahan Soeharto terjadi perubahan orientasi kebijakan industri, dari orientasi inward-looking menjadi outward-looking.

Pada pemerintah Sby-Jk, visi kebijakan industri adalah pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara industri baru. Dalam kebijakan perkembangan industri nasional, di cantumkan sasaran kualitatif dalam jangka menengah (2004-2009) dan jangka panjang (2010 – 2020). Sasaran pembangunan industri dalam jangka panjang mencakup: (1). Kuatnya industri yang memiliki daya saing berkelanjutan; (2). Kuatnya struktur industri manufaktur, terutama antara IKM dan IB (industri besar). (3) seimbangny sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan IB serta (4). Terdistribusinya industri ke seluruh wilayah tanah air. Yang menariknya kebijakan industri ini menetapkan sasaran kuantitatif dengan pertumbuhan total sektor industri setiap tahun sebesar 8.56 persen. Lebih lanjut pemerintahan SBY-Jk berani menetapkan pada tahun 2010-2020 menjadi negara Industri Maju Baru dan Tahun 2025-2050 menjadi negara industri yang tangguh di dunia.



Sumber: Departemen Perindustrian (2006)

Kita bandingkan kebijakan dari Indonesia dengan negara-negara Asia seperti dibawah ini:

Visi dan Kebijakan Industri di Negara Asia Timur dan Tenggara			
No.	Negara	Visi	Kebijakan Industri
1	Malaysia	Visi Malaysia 2020 (<i>Second Industrial Master Plan</i>)	Menekankan pada kemampuan untuk menangani rancang bangun dan perekrutasaan untuk membangun pabrik secara utuh, mengembangkan <i>advance material (advance composite material product and titanium product)</i> , dan <i>advanced manufacturing technology</i>
2	Korea Selatan	Menjadi negara maju tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan industri besi baja dengan bahan baku impor b. Industri perkapalan c. Industri elektronika d. Industri otomotif
3	India	Menjadi bangsa maju pada tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Swasembada pangan secara lestari (<i>World Player</i> dalam produk <i>carbohydrate</i>, seperti gandum, beras, dan sumber protein pula) b. Penekanan pada peranan UKM c. Menjadi produsen dunia dalam bidang material d. <i>Aero space technology</i> e. Memperkuat industri pertahanan dan keamanan
4	Cina	Menjadi negara maju tahun 2050 (<i>mid level developed nation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Swasembada pangan secara lestari b. Mengembangkan teknologi maju, termasuk <i>biotechnology</i> c. <i>Micro electronics</i> dan teknologi komputer d. Memanfaatkan sumber teknologi untuk sektor pertanian, industri kecil e. <i>Advanced materials</i> f. <i>Aero space technology</i> g. Pemanfaatan sumber energi dari luar Cina

Sumber: Sastrosoenarto (2006: 74-79)

Ketidak Mandirian dan Nasionalisme

Ketidak Mandirian

Hutang Pemerintah

Mojopahit adalah negara Merdeka tetapi bukan negara Nasional. Tetapi negara mojopahit tidak bisa disebut negara nasional karena belum seluruh wilayah. Sedang negara nasional adalah suatu negara merdeka berdaulat meliputi aspek kehidupan. Nasionalisme Indonesia sedikit berbeda dengan paham Nasionalis di dunia Barat. Karena Nasionalisme di Indonesia tidak sekuler, nasionalisme Indonesia tidak anti agama. Tidak anti agama Islam, agama Nasrani atau pun agama lain. Nasionalisme Indonesia menganut ukhuwah Islamiah. (BK, 1953;17). Negara yang Merdeka, adalah Negara yang mempunyai Kebebasan mengatur negaranya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Dengan demikian Negara yang tidak Merdeka adalah negara yang tidak mempunyai kebebasan mengatur negaranya. Hampir sama tetapi berbeda bobotnya dengan kemandirian suatu negara. Bisa saja negara Merdeka yang Nasional tetapi negara itu tidak mempunyai kemandirian, negara yang ketergantungan dengan pihak luar negeri. Ketergantungan pada hutang yang digunakan untuk Pembangunan, ketergantungan dengan bahan baku dari luar negeri yang digunakan dalam proses produksinya. Negara yang ketergantungan dengan tenaga ahli dari luar negeri, ketergantungan dengan teknologi dari luar negeri.

Kita lihat apakah Indonesia masih mempunyai ketergantungan alias ketidakmandirian. Dari sisi keuangan guna mendukung APBN jelas sampai saat ini Indonesia masih ketergantungan dengan negara donator. Jumlah hutang LN Indonesia terus meningkat dari \$ 62,021 juta (2006) menjadi \$. 65,446 juta (2008). Dilihat dari jumlah hutang LN bertambah dalam jumlah sedikit bahkan pemerintah berniat untuk menurunkan jumlah hutang LN. Dilihat dari sumber hutang, walaupun hutang pada IMF sudah menjadi nol, tetapi dari sumber lain yaitu berupa obligasi semakin membengkak. Sumber hutang itu sudah berubah dari LN ke DN. Untuk hutang domestik, sepanjang masih ada orang yang kelebihan uang mau investasi pemerintah masih memerlukan guna Pembangunan. Pada tahun 2002 sebesar Rp. 1.294,8

trilyun jumlah itu pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 1.695 trilyun. Pada tahun 2002 misalnya Pemerintah hanya menerbitkan obligasi senilai Rp. 2 trilyun. Kini jumlahnya rata-rata Rp. 150 trilyun per tahun. Pembayaran hutang jatuh tempo dibayar dengan menjual surat berharga negara (SBN) baru. Menggalakkan penjualan SBN hakikatnya sama dengan menggalakkan hutang. Pada bulan Pebruari lalu pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah terjual \$ 1 Milyar dengan yield 10.5 persen. Sedangkan untuk tenor 10 tahun, dengan yield lebih tinggi 11,175 persen. Bunga ini cukup mahal dibandingkan dengan obligasi Pemerintah AS dengan tenor 10 tahun, dilempar ke pasar dengan yield cuma 2.5 persen. (Kompas, 12 Mei 2009). Perbedaan yield yang diberikan Pemerintah AS dan Indonesia ini menunjukkan tinggi inflasi di Indonesia, sehingga pemilik uang menghendaki kestabilan nilai. Sebab lain ketidakpercayaan pada Pemerintah. Apakah jumlah hutang yang besar itu menunjukkan ketidakmandirian suatu negara. Untuk itu dilihat dengan banyak ukuran. Bisa menggunakan rasio hutang dengan ekspor. Ukuran yang terbaru, rasio hutang dikaitkan dengan PDB. Pada tahun 2002 rasio hutang dengan PDB mencapai 67 persen. Pada tahun 2008 turun menjadi 34 persen. Turun rasio hutang bukan berarti jumlah hutang menurun tetapi disebabkan adanya peningkatan PDB. Kita memang tidak boleh melupakan peringatan dari Joseph E. Stiglitz peraih hadiah Nobel, bahwa stok hutang yang meningkat tidak dikelola dengan baik ditengarai dapat menjadi sumber pemicu krisis keuangan (Stiglitz, 2006). Terjadi krisis di AS disebabkan hutang pemerintah meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun jumlahnya sekitar \$ 11 trilyun atau 80 persen dari GDP. Hutang harus di kelola dengan baik. Dalam pengelolaan hutang, kita tak hanya melihat aspek dinamika pasar yang terus bergerak. Tetapi, ada satu tujuan yang harus dilakukan, yaitu mengelola resiko dan biaya. Intinya meminimalkan biaya pada tingkat risiko yang bisa dikelola dengan baik dalam jangka panjang. Hutang yang besar tidak perlu mengkhawatirkan jika setiap sen dari hutang itu dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Dari angka-angka diatas jelas dari sisi pembiayaan keuangan Pemerintah

belum bisa mandiri. Pembiayaan keuangan masih ditopang dengan hutang baik dari LN maupun dari DN.

Ekspor

Dampak krisis global dirasakan oleh seluruh negara. Banyak negara yang sudah mengalami pertumbuhan negatif. Namun karena ketergantungan terhadap pasar global relatif lebih kecil, Indonesia masih bisa tumbuh tahun ini. Masih tetapnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan ketergantungan terhadap perekonomian global. Tahun ini (2009) pertumbuhan ekonomi Singapura negatif antara 6 - 8 persen. Thailand negatif 1.5 - 3 persen. Malaysia negatif 2.5 persen. Indonesia mungkin masih bisa tumbuh antara 3 - 5 persen. Negara yang sering bisa disebut dapat tumbuh tahun ini adalah China, India dan Indonesia. Mengapa perekonomian dapat bertahan relatif lebih baik dari negara tetangga kita?. Faktor utama yang paling utama adalah lebih kecilnya ketergantungan terhadap perekonomian global. Hal ini terlihat dari lebih kecilnya ratio ekspor terhadap PDB di Indonesia (29,8); Malaysia (103,3); Thailand (76,4 persen); Singapura (234,3 persen). Tetapi jika dilihat komposisi ekspor non migas Indonesia tahun 2003 sbb:

Kategori	2003
Human Capital Intensive (HCI)	13,8
Technological Intensive (TI)	24,7
Natural Resources Intensive (NRI)	10,1
Physical Capital Intensive (PCI)	14,9
Unskilled Labour Intensive (ULI)	36,5
Total	100

Indonesia selama ini membangun industrinya dengan berorientasi pada industri berteknologi rendah dan jenis perakitan. Tidak pernah bergerak menuju teknologi yang menengah, apalagi tinggi. Kalaupun ada IPTN (Industri Pesawat Terbang) hanya sebagai tukang rakit saja. Produk industri berteknologi rendah pada kurun 1995-1998 terus rneningkat, dari 44 persen menjadi 48 persen. Sementara produk teknologi menengah cenderung turun dari 38 persen menjadi 34 persen. Industri yang dikembangkan Indonesia berkonsentrasi pada sektor-sektor yang semakin kurang signifikan dengan pasar yang terbatas. Ekspor Indonesia, misalnya, hanya dikonsentrasikan untuk sejumlah sektor saja. Hampir separuh dan ekspor manufaktur hanya diisi lima jenis komoditas, yaitu kayu lapis, tekstil, pakaian jadi, elektronik, dan alas kaki. Padahal, untuk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki persaingannya sangat ketat, banyak negara masuk menjadi produsen barang-barang itu karena alasan kemampuan sektor itu menyerap tenaga kerja sangat tinggi. China, Vietnam, Thailand, dan India berlomba menguasai pasar. Untuk kayu lapis mengalami kesulitan bahan baku seiring dengan semakin rusaknya hutan alam Indonesia menjadi kendala produksi. Akibat dari tindakan ini bisa kita lihat, keterbatasan pasar sehingga sulit untuk meningkatkan jumlah produksi.

Di sisi lain, terjadi kekosongan industri yang memproduksi barang input *intermediate* (menengah) yang dibutuhkan industri barang jadi. Akibatnya, proporsi barang input yang diimpor menjadi sangat tinggi. Contoh yang gamblang terlihat pada industri alas kaki, *mould* (bantalan alas kaki) sepenuhnya diimpor dari negara lain. Industri di dalam negeri hanya memasang bagian atas, atau kulitnya saja. Begitu pula tekstil dan produk tekstil, hampir 99 persen kapas yang merupakan bahan baku produk katun untuk industri diimpor dengan nilai mencapai hampir 1 miliar dollar AS. Proporsi penggunaan input impor pada industri nasional sangat tinggi. Tekstil misalnya, proporsi input yang berasal dari impor mencapai 32 persen, sedangkan produk elektronika dan mesin mencapai 65 persen. Ketergantungan pada input yang berasal dan impor ini tidak berkurang meskipun teknologi yang dipakai beranjak lebih maju. Dengan adanya ketergantungan input

import harga produk yang dihasilkan tergantung dengan nilai kurs valas. Belum lagi jika perusahaan tersebut menggunakan cara transfer pricing sehingga harga pokok produk menjadi mahal.

Faktor tenaga kerja yang selama ini menjadi keunggulan komparatif industri Indonesia tidak lagi dapat dipertahankan. Produktivitas Indonesia relative buruk dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Nilai tambah manufaktur setiap pekerja di Indonesia sebesar 8.300 dollar AS pada tahun 2005, yaitu dua setengah kali lebih rendah dari Malaysia dan Filipina. Hal ini berkaitan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia sulit bersaing. Perusahaan-perusahaan sulit mencari pekerja yang memiliki keterampilan memadai.

Kelemahan juga terdapat pada struktur industri yang dibangun. Konsentrasi dan kepemilikan aset di industri nasional dikuasai sebagian kecil pengusaha. Ini berpengaruh buruk pada pengembangan sistem hukum karena bukan saja negara sangat terpengaruh oleh keberadaan mereka, tetapi juga pasar. Hanya sekitar 10 keluarga yang menguasai hampir 60 persen permodalan. Sebelum krisis 1997, empat perusahaan memproduksi lebih dari 75 persen dan total output. Begitu pula yang terjadi pada perbankan karena para pengusaha itu juga berlomba-lomba menjadi pemilik bank.

UKM yang mempekerjakan dua pertiga dan tenaga kerja di sektor manufaktur hanya memberi kontribusi 17 persen dari seluruh nilai tambah manufaktur nasional. UKM terkonsentrasi pada manufaktur padat karya, bukan penyediaan input *intermediate* bagi usaha besar. Belum lagi sempitnya akses UKM ke perbankan. Hubungan negara dengan usaha besar yang terjalin erat secara tidak sadar telah meminggirkan UKM dan kebijakan industri dan usaha secara keseluruhan. Terpinggirkannya UKM juga akibat investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) yang tidak berminat pada pengembangan industri lokal untuk memproduksi input *inter-mediate*. Sekitar 60-70 persen input untuk industri pakaian jadi, tekstil, alas kaki, dan obat-obatan di impor dan luar negeri. Begitu pula industri mesin, sepeda motor, dan elektronik membeli 90 persen komponennya dari

luar negeri. Dilihat secara keseluruhan, sumbangan netto FDI terhadap neraca pembayaran tahun 1985-1999 sebenarnya negatif. Hal itu dikarenakan laba yang dihasilkan dan investasi dikirimkan kembali ke negara asal. Dari pengamatan The United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), tidak ada bukti kuat yang menyatakan FDI (Foreign Direct Investment) berpengaruh terhadap perkembangan positif pada perekonomian negara yang menjadi tempat investasinya. Tetapi kehadiran UKM diperlukan mengingat UKM dapat memberikan kesempatan kerja yang cukup banyak; kedua UKM menyumbangkan ekspor non migas yang cukup signifikan dan ketiga UKM mempunyai adaptasi akan perubahan yang lebih besar dari pada industri menengah dan besar.

Persentase Kandungan Bahan Baku Impor dan Barang Antara

No	Sub Sektor	1990	1993	1995	1998
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	11	7	10	8
2	Tekstil, Garmen dan Kulit	31	35	35	40
3	Kayu dan Barang dari Kayu	3	3	3	5
4	Kertas dan Barang dari Kertas	35	30	29	31
5	Kimia	42	35	32	35
6	Barang galian bukan Logam	28	28	21	36
7	Logam Dasar	50	58	59	42
8	Barang olahan lainnya	33	45	34	35
9	Semua industri olahan besar dan menengah	31	28	32	33

Sumber: Statistik Industri Besar dan Menengah, BPS

Nasionalisme

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap

nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.. Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, mau apa jadinya generasi muda tersebut? Moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Apa akibatnya jika penerus bangsa tidak memiliki rasa nasionalisme?.

Era globalisasi perlu dihadapi dengan semangat nasionalisme yang sama kuatnya seperti saat negara-negara lemah melawan penjajahan zaman dulu. Nasionalisme era sekarang perlu diwujudkan dalam kecerdikan mengelola peluang yang timbul dari globalisasi, dengan semangat meningkatkan kesejahteraan rakyat, harkat dan martabatnya. Tak terbantahkan, banyak sekali hal yang harus

dilakukan untuk mencapai Indonesia yang maju, sejahtera dan bersatu dengan daya saing yang tinggi. Dengan perencanaan yang tepat, yang dilaksanakan dengan kesungguhan di bawah kepemimpinan nasional yang visioner, kita akan mampu mencapainya. Semoga suasana memperingati hari Kebangkitan Nasional tahun ini dapat menggugah kita untuk hidup sebagai bangsa yang bermartabat di era globalisasi ini.

Apapun usaha kita, pada akhirnya konsumenlah yang menentukan pilihan. Meski pun ada berbagai macam instrumen perlindungan, kalau konsumen menghendaki barang serupa tetapi dari impor, tentu ada saja jalannya. Misalnya dengan penyelundupan. Seperti kasus baju bekas asal luar negeri (yang benan-benar sudah lusuh dan berber cak-bercak) yang sekanang diperdagangkan secara terbuka dan besar-besaran di Medan yang daya taniknya semata-mata hanya ka rena merk atau asal luan negeninya. Maka sungguh penting untuk meyakinkan konsumen bahwa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri adalah suatu tindakan yang benar dan terpuji dan tindakan memilih produk impor, padahal ada produk yang serupa buatan dalam negeri, merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat. Maka langkah ketiga yang harus dilaksanakan pula secara serempak, adalah usaha membudayakan semangat mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri di ka langan masyarakat.

Tujuannya adalah menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai budaya masyarakat yang menghargai segala yang dibuatnya sendiri, sehingga secara sadar mengutamakan penggunaannya. Dengan demikian masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang mantap bagi produksinya sendiri. Sehingga meningkatnya taraf hidup dan daya beli masyarakat, tidak akan diikuti dengan meningkatnya permintaan akan barang-barang impor, akan tetapi sebaliknya akan menumbuhkan rangsangan bagi pertumbuhan produksi dalam negeri. Usaha ini tidak hanya terbatas pada masyarakat yang menjadi konsumen akhir, dan juga tidak hanya terbatas pada barang-barang konsumsi.

Pemerintah juga harus meyakinkan dunia usaha untuk mendahulukan penggunaan barang-barang modal, bahan baku dan penolong, serta jasa-jasa yang tersedia dan ada potensi untuk

dikembangkan di dalam negeri. Upaya ini hanya bisa berhasil apabila Pemerintah mempelopornya. Maksudnya, selain untuk memberi contoh teladan, juga karena Pemerintah adalah pembeli terbesar dalam masyarakat. Sedemikian pentingnya pembelian oleh Pemerintah sehingga ada beberapa produk yang hidupnya ditentukan oleh pembelian Pemerintah. Maka mengarahkan pembelian Pemerintah agar mendahulukan apa yang telah diproduksi di dalam negeri adalah penting sekali. Pembangunan proyek-proyek haruslah mampu memanfaatkan barang dan jasa yang telah diproduksi di dalam negeri. Bahkan lebih jauh lagi pengadaan Pemerintah harus bisa mendorong berkembangnya potensi produksi baru.

Usaha ini harus dijadikan semacam kampanye atau gerakan nasional. Bagi mereka yang mampu memilih dan terlanjur lebih suka dan lebih percaya kepada produk impor, maka sasarannya adalah untuk mengubah sikap. Bagi masyarakat luas ia merupakan bagian daripada usaha untuk membentuk kepribadian, dalam rangka membangun bangsa yang berwatak sendiri. Kampanye itu terutama harus ditujukan kepada generasi muda kita, dan dilakukan sedemikian mungkin. Akhirnya dibalik berbagai pertimbangan sosial ekonomi yang melandasi usaha membangkitkan semangat masyarakat untuk mengutamakan hasil karya bangsanya sendiri itu, kita mendapatkan dasar-dasar pemikiran yang lebih dalam, yaitu keinginan untuk membangun bangsa yang pandai membuat dan bukan hanya pandai memakai, bangsa yang disegani dan tidak dijadikan mangsa bangsa lain, bangsa yang kuat, yang mampu mempertahankan kedaulatan dan kepribadiannya karena kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya sendiri, bangsa yang mampu membangun dirinya dengan kecerdasannya, ketrampilannya, dan keuletannya.

Kita tidak mungkin memperoleh kembali kemandirian kalau kita tidak berani melakukan terobosan yang inovatif dan kreatif. Inovasi dan kreativitas memang selalu harus menerobos penghalang yang sudah menjadi aturan main, konvensi, dogma dan doktrin. Namun untuk melakukan itu semuanya ada biayanya, ada resikonya dalam bentuk kesengsaraan sementara. Maka untuk meraih kemandirian, kita harus menggalang kekuatan nasional. Bagaimana caranya ?. Hentikan pandangan dengan sistem lalu lintas devisa harus bebas mengambang

total, hentikan penjualan BUMN pendeknya liberalisasi total, globalisasi total, dan asingisasi total. Maka dalam rangka membangun kekuatan nasional, yang pertama harus kita lakukan adalah menumbangkan doktrin-doktrin anti nasionalisme yang terus menerus tanpa bosannya harus kita ulangi lagi dan ulangi lagi. Cara inilah yang diterapkan oleh Bung Karno dalam menggalang kekuatan nasional. Marilah kita bahas apakah benar bahwa nasioanlisme memang sudah mati dan tidak relevan lagi ? Tidak dapat dipungkiri bahwa tatanan dunia telah berubah banyak, dan globalisasi adalah hal yang riil. Namun jika ada yang mengatakan bahwa nasioanlisme sudah mati dan tidak relevan lagi adalah kesalahan besar.

Presiden George W. Bush, baik dalam tutur katanya maupun dalam simbolisme-nya jelas seorang nasionalis sejati. Setiap hari dia menyematkan pin bendera Amerika Serikat pada dadanya, hal yang dilakukan oleh banyak dari para menterinya. Lebih dari itu, Bush menganjurkan supaya setiap orang Amerika setiap harinya menyematkan bendera Amerika di dadanya, dan hampir setiap department store menjualnya. Majalah di Amerika dianjurkan untuk memasang bendera Amerika pada cover-nya. Kata-katanya adalah : "July 1942 United we stand. Beranikah Anda menghujat Amerika sebagai ketinggalan zaman, katak dalam tempurung, tidak mengerti globalisasi dan seterusnya ?

Pada tanggal 18 Maret 2002 Uni Eropa berkumpul di Barcelona menyelenggarakan konperensi tingkat tinggi yang kesimpulannya penuh dengan nasionalisme Eropa. Memang sudah bukan negara-negara Eropa secara individual, tetapi menjadi Uni Eropa. Jelas sekali semangat kebangkitan kembali nasioanlisme Eropa yang terang-terangan membandingkan dirinya dengan Amerika Serikat dengan semangat yang tidak mau kalah. Kita tidak perlu mengemukakan fakta-fakta betapa Malaysia, Jepang dan RRC tidak pernah tidak nasionalistis. Jauh sebelum itu, Edith Cresson sebagai Menteri Perdagangan Perancis membeli paberik elektronik Thomson dengan teknologi primitif untuk dijadikan BUMN. Paberik ini dibeli dan dijadikan BUMN karena kalah bersaing dengan Jepang dan mengalami kerugian besar. Ketika ditanya oleh parlemen Perancis mengapa, karena tidak menguasai hajat hidup

orang banyak, dijawab bahwa dia tidak bisa melihat pasaran cosumers electronics Perancis di dominasi oleh Jepang. Bukankah ini nasionalisme ? Ataukah harus dikatakan bahwa parlemen Perancis adalah katak dalam tempurung ? Philips membeli Grundig yang adalah saingannya dan hampir bangkrut. Ketika saya tanyakan langsung kepada Prof. Dekker, Komisaris Utama Philips dia menjawab bahwa dia tidak bisa menerima pasaran elektronik Jerman didominasi oleh Jepang. Ketika Hollywood dibeli oleh Sony, Sony dibuat bangkrut oleh para artis yang menandatangani kontrak dan terang-terangan tidak muncul ketika harus dibuat filmnya. Mereka menantang Sony supaya semua artis dituntut. Apakah sikap ini bukan nasionalisme Amerika ? Dan apakah ini nasionalisme sempit ?. Ketika IMF menekan kami untuk membebaskan bea masuk beras dan gula sampai nol persen, Eropa, Amerika dan Jepang memberlakukan bea masuk yang tinggi untuk produk-produk pertanian demi melindungi para petaninya. Apakah itu bukan nasionalisme, yang bahkan sangat tidak adil dan mau menangnya sendiri ?

Memang harus diakui bahwa walaupun kita telah merdeka 64 tahun lamanya, pengertian dan penghayatan nasionalisme oleh banyak orang, dibawah sadarnya masih banyak didominasi oleh nasionalisme pra kemerdekaan. Nasionalisme pra kemerdekaan fokusnya sederhana dan tunggal, yaitu menumbangkan resim kolonial untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Apakah founding fathers kita tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah memperoleh kemerdekaannya, serta apa tujuan yang lebih lanjut dari sekedar merdeka secara politik ? Kalau kita mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita, jelas sekali jangkauan pemikiran para founding fathers kita yang sangat luas dan jauh kedepan. Bung Hatta sendiri merupakan monumen dalam pemikiran pembangunan ekonomi. Tetapi karena perjuangan kemerdekaan itu sendiri adalah perjuangan yang panjang dan sangat berat, fokus segala pemikiran dan upaya memang seolah-olah hanya terpusat pada kemerdekaan politik belaka. Kemudian setelah kita merdeka, kita langsung dihadapkan pada masalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan sebagai nation state yang kokoh dan bersatu padu.

Dari uraian tadi jelas, bahwa percaturan dunia diwarnai oleh hubungan antar negara yang semuanya sudah merdeka secara politik, menyempitnya perbedaan ideologi antar negara, sedang berlangsungnya proses regionalisasi negara bangsa di mana-mana, menciptakan pengelompokan-pengelompokan baru atas pertimbangan yang lebih banyak di dominasi oleh pertimbangan ekonomis, tetapi di motori oleh semangat nasioanlisme baru dengan daerah geografis yang lebih luas. Nasionalisme baru adalah nasionalisme yang mengenali dengan tajam interaksi antarbangsa zaman sekarang dan mampu mengantisipasi perkembangannya. Maksudnya tidak hanya memantau sambil menutup dirinya, tetapi ikut bermain di dalam percaturan dan interaksi antar bangsa di dunia. Namun orientasi dari pengenalan dan kewaspadaan ini bukan untuk kemakmuran orang seorang, melainkan untuk seluruh bangsanya seadil mungkin. Semanagt nasioanlisme baru dalam menciptakan dan merebut nilai tambah tidak mau kalah dengan bangsa lain, tetapi tidak melalui penutupan diri, melainkan melalui semangat saling mengungguli.

Dengan demikian, seorang nasionalis baru adalah orang yang menghitung dengan tajam dan enggan menerima tawaran menjadi komprador mitra dagang asing, kalau dari perhitungannya dia tahu bahwa nilai tambah secara tidak adil dan tidak seimbang lebih menguntungkan mitra asingnya daripada bangsanya. Seorang nasionalis baru adalah orang yang merasa sangat terganggu ketika di luar negeri menyaksikan alangkah kalahnya negaranya sendiri dalam segala bidang, dalam kemakmuran, dalam penguasaan teknologi dan manajemen, dalam kebersihan, dalam keadilan sosialnya, dan menterjemahkan rasa malu itu ke dalam semangat tidak mau kalah dan ingin mengejar ketinggalannya. Orang yang bukan nasionalis baru adalah orang yang ketika menyaksikan semuanya itu lalu berkeinginan menetap saja di luar negeri, atau tidak menetap, tetapi membeli rumah, mobil, minta izin tinggal, supaya dari waktu ke waktu bisa menikmati kemakmuran negara lain itu, dan memikirkan bagaimana dia bisa meningkatkan kemakmurannya di luar negeri yang sudah nyaman dengan menggait nilai tambah dari negaranya sendiri, kalau perlu hanya sebagai komprador saja. Seorang nasionalis baru ketika

mengunjungi paberik langsung melakukan catatan-catatan dan pemotretan-pemotretan dengan semangat ingin meniru membuat barang.

Orang yang bukan nasionalis baru hanya berkeinginan memiliki produk untuk konsumsinya sendiri supaya bisa lebih bergaya. Seorang yang bukan nasionalis baru tanpa perasaan terganggu memakai barang mewah buatan luar negeri dengan bangganya, sedangkan nasionalis baru juga memakainya, tetapi selalu diliputi perasaan penasaran mengapa bangsanya tidak bisa membuat barang yang sama. Seorang yang bukan nasionalis baru mau saja bermitra dengan perusahaan asing untuk menggait nilai tambah bagi si asing tanpa perasaan terganggu. Seorang nasionalis baru mungkin juga melakukan dan berbuat yang sama, tetapi selalu diganggu oleh perasaan penasaran, mengapa dia tidak bermitra juga dengan perusahaan asing di negara si asing juga, supaya sama derajatnya. Seorang nasionalis baru berusaha keras supaya memperlakukan para ahli Indonesia sama dan sederajat dalam perlakuan, dalam kepercayaan dan dalam penggajian dengan para ahli asing, asalkan pendidikannya di sekolah yang sama di luar negeri, dan pengetahuan yang dimilikinya maupun kepandaianya sama. Seorang yang bukan nasionalis baru cenderung masih dilekati oleh jiwa yang terjajah, yang selalu lebih menghargai para ahli asing, terutama yang bule, walaupun pilihan yang dihadapinya, yang bangsanya sendiri juga tamatan dari sekolah yang sama, dan bisa menunjukkan bahwa dia paling sedikit sama pandainya, sama pengalamannya, dan lebih mengenal Indonesia daripada para ahli asing itu.

Karena nasionalisme baru begitu terkait dengan interaksi bangsa-bangsa lain, ekspor memegang peranan penting. Tahapan-tahapan kemampuan sesuatu bangsa dalam ekspor, bisa kita bedakan sebagai berikut :

- Tahap pertama .

Mengekspor barang buaatannya sebagai "tukang jahit". Design, spesifikasi, cara membuatnya, mesin-mesinnya, prosedur produksi dan administrasinya, bahan bakunya, semuanya ditentukan oleh perusahaan asing yang akan menampung

produknya untuk dipasarkan di luar negeri. Merk juga harus memakai merk dari prinsipal. Untuk jasanya, mitra Indonesia yang "tukang jahit" ini memperoleh imbalan sekedarnya. Biasanya sangat kecil. Tetapi dari bekerja sebagai "tukang jahit" ini, dia menguasai pengetahuan dan ketrampilan untuk membuat produk yang eksak sama.

- Tahap Kedua:

Setelah terampil menjadi "Tukang Jahit" Maka dia mulai meningkatkan dirinya ke dalam tahapan yang berikutnya, yaitu membuat barang yang eksak sama, tetapi memakai merknya sendiri. Dengan demikian ternyata bahwa harga pokoknya jauh lebih rendah dari harga yang dijual di luar negeri dengan merk prinsipalnya. Jadi dia sekarang sudah bisa membuat barang yang kualitasnya eksak sama, tetapi dengan memakai merknya sendiri. Ini adalah tindakan yang sangat prinsipial dan krusial, karena dia sekarang dipaksa untuk bisa meyakinkan konsumen di luar negeri, bahwa produknya tidak kalah dalam kualitas, tetapi sangat menang murah dalam harga. Hanya merknya yang masih belum terkenal. Dia harus melakukan promosi dan advertensi supaya merknya dikenal dan diakui sebagai sama baiknya dengan merk lain yang ditiru.

- Tahap ketiga:

Tahap berikutnya adalah mulai memasukkan features, kemampuan-kemampuan tambahan dari produk yang tadinya ditiru 100 %. Contohnya adalah PC buatan Taiwan, yang meniru IBM, tetapi ditambah kemampuannya, sedangkan harganya jauh lebih murah. Tindakan ini memperkuat kedudukannya di pasar.

- Tahap ke empat:

Tahapan selanjutnya adalah Dia sudah berani merubah design produknya supaya tampak lebih indah dan lebih cantik. Dia sudah mulai berani beradu dalam bidang estetika.

- Tahap ke lima:

Melakukan penelitian dan pengembangan sendiri, sehingga untuk barang yang fungsinya sama, yaitu memenuhi kebutuhan manusia akan barang yang dihasilkannya, dia sudah mendasarkan diri pada penemuan dan terbosoan teknologi sendiri. Misalnya, TV yang sama-sama TV-nya sudah meningkat dari sistem analog menjadi sistem digital. Musik yang tadinya atas dasar pita diganti menjadi piringan laser, dan sekarang compact disc.

Jelas bahwa untuk meningkatkan kemampuan dari tahapan ke tahapan seperti yang digambarkan diatas, orang membutuhkan dedikasi semangat yang luar biasa besarnya. Juga membutuhkan berani mempertaruhkan modalnya untuk pnelitian dan untuk merugi kalau gagal.

Memperbaiki Kondisi

Daya Saing

Untuk mengukur konsentrasi suatu industri ada beberapa cara yang bisa digunakan. Di antaranya yang paling lazim dan index CR4 (Concentration Ratio of the 4 large companies) ialah suatu koefisien yang menjelaskan persentase penguasaan pangsa pasar oleh 4 perusahaan terbesar dalam suam indusui. Koefisien CR-4 yang sernakin kecil mencernninkan struktur yang semakin bersaing sempuma. Pasar suatu industri dinyatakan berstruktur oligopolistik apabila koeflsien CR- 4 melebihi 0,40 atau 40%. Berdasarkan kriteria CR4. struktur pasar sektor industri di Indonesia pada umumnya oligopolistik. Pada tahun 2001, rasio konsentrasi rata-rata sektor industri pengolahan adalah 50%. Dari 9 kelompok industri menurut klasifikasi dua digit ISIC, 5 di antaranya berkoefisien CR-4 lebih dad 40%. Hanya industni tekstil, pakaian jadi dan kuit serta industn kayu dan barang-barang dari kayu yang berkoefisien CR4 di bawah 40%. CR4 tertinggi ialah di bidang industri makanan kecil, soft drink, air mineral; kendaraan bermotor; alat telekomunikasi dan tembakau, sebesar 60-82. Dengan perkataan lain, struktur pasar di sektor industri cenderung semakin oligopolistik.

Pemerintah dalam hal ini turut andil dalam menciptakan struktur industri yang oligopolistik. Benih oligopoli itu adalah Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.75/KP/1/1983, yang mengesahkan asosiasi bagi para pelaku bisnis. Sampai dengan tahun 1980 baru terdapat satu asosiasi Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Dalam tahun ditetapkannya surat keputusan tadi, berdiri 70 asosiasi baru. Jumlah asosiasi bisnis yang terbentuk bertambah terus tahun demi tahun. Sampai dengan tahun 1994 tercatat sudah terbentuk 377 macam asosiasi. Dilihat dari jenis unsur pembentuk anggotanya, yang terbanyak adalah asosiasi produsen, ada 111 asosiasi. Selain itu, 42 asosiasi distributor; 28 asosiasi eksportir; dan 4 asosiasi importir. Sedangkan 191 selebihnya merupakan asosiasi lain-lain yang sulit digolongkan ke dalam salah satu asosiasi spesifik.

Asosiasi-asosiasi bisnis itu semula terbentuk sebagai wahana pengadaan bahan baku atau pemasaran bersama di kalangan anggota, sekaligus sebagai wadah menggalang kebersamaan dan kekuatan para pengusaha dalam negeri. Keberadaan awal mereka tidak menimbulkan distorsi pasar. Namun dalam perkembangannya kemudian, asosiasi-asosiasi tersebut telah berubah menjadi semacam kartel dagang yang cenderung mendudukkan konsumen dan pemasok bahan baku pada posisi yang terpojok. Kehadiran mereka dewasa ini justru malah menimbulkan distorsi pasar. Pemerintah sendiri acapkali tidak berdaya menghadapi asosiasi-asosiasi demikian; apalagi jika di antara anggotanya terdapat pengusaha besar, yang biasanya juga merupakan pengurus asosiasi yang bersangkutan. Kalangan pengusaha besar, dengan hegemoni dan kekuatan lobi mereka, pada umumnya cukup cerdik untuk memanfaatkan asosiasi yang anggotanya sebagai sarana mengembangkan dan memantapkan pangsa pasar.

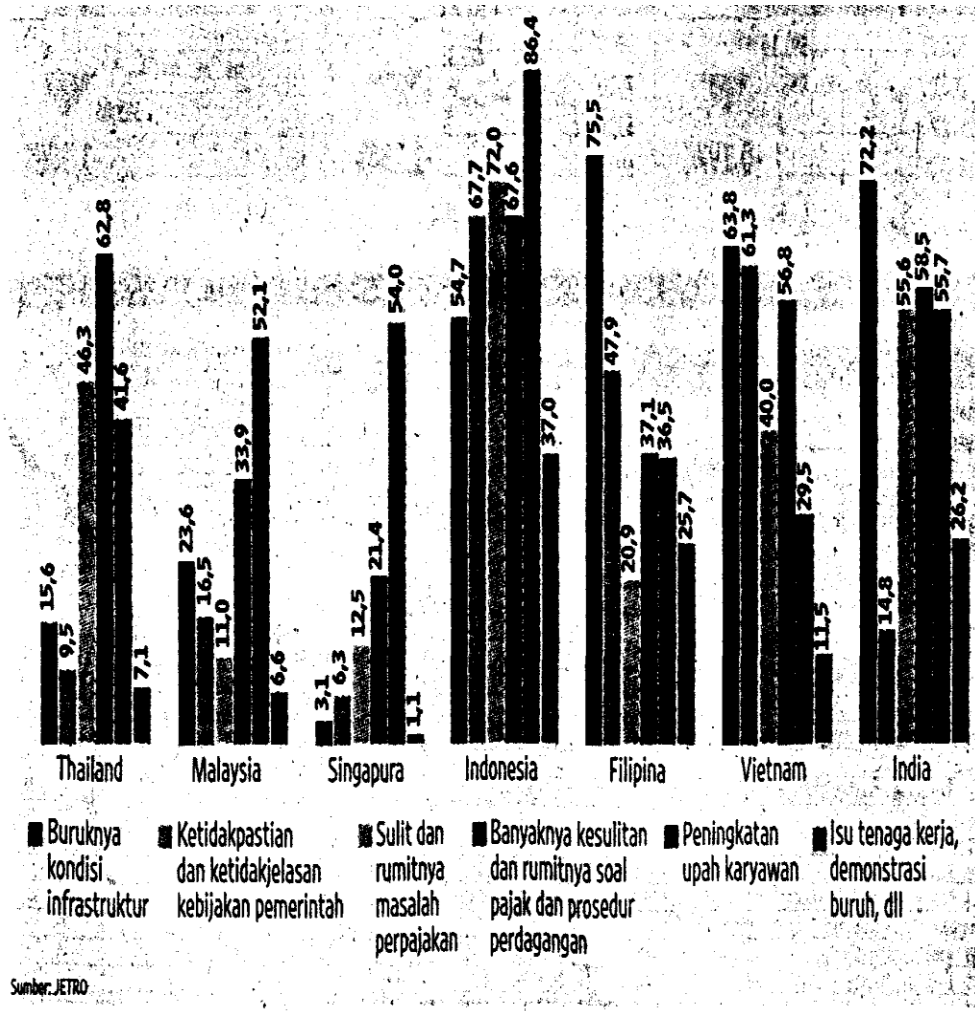
Struktur pasar yang oligopolistik (untuk jenis industri atau komoditas tertentu bahkan ditengarai sudah monopolistik) telah menyebabkan perusahaan-perusahaan, terutama yang berskala besar, kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi. Proteksi dan subsidi terselubung telah memanjakan mereka akan kepastian pasar dalam negeri yang terjamin (*captived*). Akibatnya daya saing mereka dalam menghadapi produk sejenis buatan pasar luar negeri, atau di pasar

mancanegara, tak dapat diandalkan. Mereka sendiri kurang tertarik untuk berorientasi ekspor perilaku seperti itu diduga karena subsektor yang berkonsentrasi tinggi memang tak mampu bersaing di pasar terbuka, sebab tidak tersedia proteksi bagi mereka di sana. Daya saing suatu komoditas industri di pasar dunia dapat ditelaah dengan tiga macam kriteria yaitu Constant Market Shares (CMS), Effective Rate of Protection (ERP), dan Domestic Resource Costs (DRC).

Kriteria CMS didasarkan pada tiga efek yaitu efek pertumbuhan pasar dunia; efek komposisi komoditas; dan efek daya saing itu sendiri. Sedangkan ERP membandingkan nilai keluaran suatu komoditas dalam struktur industri yang protektif dengan nilai keluarannya andaikata tidak dilindungi. Adapun DRC mengukur (keunggulan komparatif suatu komoditas industri berdasarkan muatan sumber daya dalam negeri yang digunakan (devisa yang dihemat) untuk menghasilkan komoditas yang bersangkutan. Ditinjau berdasarkan kriteria CMS tahun 2001 bahwa ekspor komoditas industri kita sebagian besar (52 dari 134 macam kelompok komoditas menurut nomenklatur SITC) memiliki efek pertumbuhan positif. Maksudnya, perkembangan ekonomi dunia berdampak menumbuhkan ekspor komoditas yang bersangkutan. Tinjauan berdasarkan kriteria ERP jauh lebih mengejutkan. Dan 134 macam kelompok komoditas tadi, hanya ada 47 macam yang layak dipendagangkan di pasar global. Diukur berdasarkan kriteria DRC, hanya 12 macam komoditas industri Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif untuk diekspor. Survei WEF (World Economic Forum) menunjukkan peringkat daya saing industri terus menurun Tahun 2001 di peringkat 64 dari 75 negara. Tahun 2002 peringkat 67 dan 80 negara, tahun 2003 peringkat 72 dan 102; tahun 2004 peringkat 69 dari 104 negara; dan tahun 2005 peringkat 74 dari 117 negara. Selain itu, WEF menempatkan Indonesia pada peringkat 89 dari 117 negara pada Survei buruknya pelayanan publik.

Guna memperbaiki daya saing produk industri Indonesia langkah awal adalah menghilangkan efisiensi. Sumber efisiensi dapat diidentifikasi berasal dari: biaya tinggi di jalan raya; biaya tinggi di pelabuhan; infrastruktur (jalan/energi) belum memadai; tarif pajak tinggi dan belum harmonis; restitusi pajak yang lama; suku bunga yang

tidak kompetitive; proses perijinan yang lama; kasus-kasu perburuhan; penyelundupan dan peraturan yang tumpang tindih.



Mengendalikan Konsentrasi Pasar

Satu isu rawan dalam konteks perindustrian di Indonesia adalah masalah konsentrasi industri, yang kemudian bermuara ke persoalan struktur pasar industri yang bersangkutan. Akibat proteksi berkepanjangan terhadap industri-industri yang tumbuh semasa

kebijaksanaan substitusi impor, diyakini terjadi konsentrasi pada beberapa jenis industri di Indonesia sehingga pasarnya berstruktur oligopolistik. Struktur pasar yang oligopolistik karena proteksi tidak saja merugikan pihak konsumen karena mereka harus membayar harga lebih mahal atas produk-produk industri yang dilindungi, tapi juga berdampak tidak mendewasakan industri yang bersangkutan. Proteksi memungkinkan perusabaan perusahaan di sektor industri menikmati rente ekonomi secara berlebihan, efisiensinya merupakan efisiensi yang semu.

Pengendalian “kekuatan monopoli” merupakan antisipasi Pemerintah untuk memperbaiki proses berjalannya mekanisme pasar bebas dengan baik, karena didalamnya terkandung kemungkinan tindakan-tindakan pelaku bisnis yang berpotensi dapat merugikan kepentingan konsumen (Baye,2006). Kegagalan mekanisme pasar ini dapat bersumber dari terbentuknya kekuatan pasar yang merugikan konsumen, yaitu dengan menetapkan tingkat harga jual barang dan jasa jauh di atas kalkulasi biaya marginal dalam proses pengadaan dan proses produksi barang atau jasa tersebut. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Mudah diterka, karena kepincangan pasar dapat diciptakan apabila perusahaan telah menguasai pasar di kelompok industrinya, sehingga para pesaing tidak memiliki kemampuan untuk menambah pasokan barang di pasar dari insentif harga jual yang tinggi ini.

Kekuatan monopoli dapat menghalangi sebagian kelompok konsumen yang ingin mengkonsumsi barang atau jasa perusahaan, tetapi tidak mempunyai daya beli yang cukup akibat penetapan harga yang tinggi. Dalam istilah ilmu ekonomi seluruh kerugian konsumen ini disebut dengan “deadweight loss”. Tetapi dilain pihak masih ada sebagian konsumen dengan daya beli tinggi dapat memperoleh manfaat dari pembelian barang dan jasa tadi. Manfaat ini menurut kelompok konsumen mampu dipersepsikan sebagai kepuasan yang mereka peroleh dengan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut, walaupun tingkat harga jual barang dan jasa yang dipatok produsen adalah relatif tinggi. Menurut istilah ilmu ekonomi hal ini disebut dengan “consumer surplus”.

Peraturan tentang persaingan sehat cukup banyak ragamnya, masing-masing dikeluarkan melalui Undang-Undang tersendiri di berbagai negara maju di dunia. Penelusuran dari informasi yang ada, umumnya negara-negara tersebut mengeluarkan peraturan permainan persaingan usaha yang sehat, dengan melarang hal-hal berikut ini:

- 1) Larangan melakukan persengkongkolan bisnis yang merugikan pesaing lainnya.
- 2) Monopoli atau memperoleh hak khusus atas dasar KKN dengan birokrat.
- 3) Proses tender yang tidak transparan, atau menggunakan perusahaan alibaba.
- 4) Differensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang merugikan pihak pesaing.
- 5) Proses merger dan akuisisi yang ditujukan untuk mengurangi tingkat persaingan.
- 6) Horizontal dan vertical merger yang mengarah pada dominasi konsentrasi pasar. (Vertical merger untuk tujuan efisiensi dan pengurangan harga jual masih diperbolehkan).
- 7) Proses produksi, kualitas produk, dan kampanye iklan yang merugikan pihak konsumen.
- 8) Memberikan informasi tentang produk dan pelayanan yang menyesatkan kepentingan konsumen.
- 9) Ketentuan-ketentuan lainnya.

Pengendalian kekuatan monopoli pasar jika ingin efektif perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mengikat demi terselenggaranya persaingan kegiatan usaha secara transparan, adil dan tidak merugikan konsumen. Penggunaan angka konsentrasi pasar sudah tidak dapat digunakan untuk menduga terjadinya persaingan yang tidak sehat. Peraturan-peraturan yang mengikat demi tegaknya "persaingan sehat" di negara kita masih harus ditegakkan, karena masih banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha domestik di segala ukuran konsentrasi pasar di negara kita yang merugikan konsumen. Rasio konsentrasi pasar di masa mendatang menjadi tidak dapat digunakan sama sekali pada saat negara kita memasuki tahun 2015, dimana lalulintas barang, jasa dan

uang menjadi bebas di kawasan perekonomian Asean. Hal ini merupakan komitmen bersama para pimpinan negara ASEAN termasuk Indonesia.

Contoh sebagian besar industri besar di Indonesia bercorak Oligopolistik yang menyerupai monopoli. Bentuk persaingan seperti ini membuat produsen mempunyai kekuatan yang cukup besar menetapkan harga yang lebih wajar, sehingga merugikan konsumen yang akan membeli produk yang di butuhkan dengan harga yang mahal. Di sisi lain UKM berada dalam kondisi persaingan monopolistik yang mendekati persaingan sempurna. Posisi UKM seperti ini membuat kerugian bagi produsen yang tidak mampu mendapatkan keuntungan yang cukup.

Melindungi Hasil Produksi Dalam Negeri

Dan pihak pengusaha sendiri harus pula ada langkah-langkah untuk membina dan memperbaiki diri, meningkatkan efisiensi, menghasilkan produk yang bermutu dan bersaing serta dapat diandalkan oleh masyarakat. Kesempatan memperoleh perlindungan jangan disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan memang wajar dalam dunia usaha, tetapi harus pada tingkat yang layak, dan tidak merupakan "pemerasan" pada konsumen yang tidak punya pilihan lain, atau yang dengan kesadarannya sendiri mendasakan penggunaan produksi dalam negeri. Bahkan keuntungan yang ada janganlah ingin cepat-cepat dinikmati secara konsumtif tetapi harus dicurahkan kembali kepada kegiatan yang produktif, kepada peningkatan investasi, usaha meningkatkan pengetahuan dan teknologi, usaha meningkatkan mutu, usaha meningkatkan efisiensi, usaha meningkatkan daya saing. Kalau kita berbi cina mengenai pengorbanan dan rasa kesadaran nasional, kita tidak menunjukannya hanya kepada masyarakat konsumen, tetapi juga kepada masyarakat pengusaha. Para produsenpun harus sanggup berkorban dan demi kesadaran nasional yang setimpal, seperti yang kita harapkan dan masyarakat sebagai konsumen. Pemberian perlindungan yang wajar, yang dibarengi dengan pembinaan sektor-sektor produksi secara teratur dan terarah disertai sikap dan semangat membangun dan para pengusaha, dapat menumbuhkan kemampuan

bangsa kita untuk menghasilkan barang dan jasa yang kita butuhkan dan yang dapat kita jual kepada orang lain. Kita akan lebih mampu menghasilkan produk yang memenuhi selera dan mutu yang dikehendaki oleh pasar dengan harga yang wajar dan bersaing.

Maka untuk membantu pertumbuhan industri dalam negeri harus ada dukungan dari Pemerintah dan masyarakat secara sadar, konsisten dan konsekuen. Proses yang sama telah dilampaui oleh banyak negara di dunia. Negara-negara kontinental Eropa, seperti Jerman, dan Amerika Serikat, dalam tahap permulaan proses industrialisasinya juga memberikan perlindungan terhadap industri dalam negerinya dari saingan produk Inggris, yang pada waktu itu telah lebih maju. Mereka ini kemudian berkembang menjadi raksasa-raksasa industri yang bahkan bisa menyusul Inggris. Demikian pula Jepang, yang sangat ketat sekali melindungi industri dalam negerinya. Negara-negara berkembang yang maju sangat pesat seperti Korea, menciptakan sistem perlindungan pula bagi industri nya, bahkan terlebih ketat lagi. Negara-negara berkembang itu tumbuh menjadi negara-negara industri baru yang amat kuat dan sekarang telah mulai menyaingi negara-negara industri lama. Sejarah mencatat bahwa akhirnya Inggris pun, tanah-air dan guru perdagangan bebas seperti Adam Smith dan David Ricardo, menjadi negara yang sangat proteksionis.

Memang ada sementara pandangan, bahwa sikap proteksionisme pada akhirnya lebih merugikan daripada menguntungkan bagi perkembangan ekonomi suatu bangsa dan bagi ekonomi dunia. Pandangan itu ada benarnya, namun tidak seluruhnya benar. Di Jerman misalnya ada Friedrich List, di Amerika ada Alexander Hamilton dan Henry Carey, yang berpendapat bahwa industri yang sedang tumbuh harus dilindungi, dan perdagangan bebas akan mematikan benih-benih yang sedang tumbuh itu. Carey mengatakan bahwa: "free trade would, if followed to its logical conclusion, establish only factory for the whole world the relegate the rest of the world to the position of suppliers of raw material".

Sebaliknya negara-negara maju seharusnya tidak turu-turut terjun ke dalam perang kapital proteksionisme, yang sekali dimasuki sulit keluar lagi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa proteksionisme untuk melindungi industri (dan negara) yang baru tumbuh dapat dibenarkan, tetapi (negara) industri yang telah maju seharusnya tidak menjalankannya. Apa yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Negara-negara industri justru makin ramai memasang banikade-banikade ekonomi, seperti kita rasakan pada ekspor tekstil kita ke Amerika, atau ekspor plywood kita ke Jepang. Sekarang ini semua pihak meneriakkan semboyan perdagangan bebas, tetapi hampir tidak ada yang menjalankannya. Kasus Ehron dan Krisis Finance adalah tanda-tanda akan berakhirnya mekanisme pasar. Maka seyogyanya kita sebagai negara berkembang yang baru saja akan memulai proses industrialisasi, tidak perlu ragu-ragu atau malu-malu melindungi produksi kita sendiri.

Perlindungan terhadap industri dalam negeri memang acapkali dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Seolah-olah konsumen menjadi korban hanya untuk melindungi kepentingan sekelompok industrialis, karena rakyat harus membayar lebih mahal untuk membeli buatan dalam negeri, yang seharusnya bisa diperoleh dengan lebih murah (dan lebih baik) apabila boleh memilih buatan luar negeri. Pandangan-pandangan serupa itu tidak mempertimbangkan bahwa di dalam proses produksi terlibat kepentingan banyak pihak, di samping pemilik modal. Buruh dan karyawan juga mempunyai kepentingan, bahkan jumlah mereka lebih banyak, dan kehi dupannya lebih peka (*precarious*) tergantung kepada ada tidaknya yang dikerjakan atau diproduksi, dan pada para pemilik modal yang mempunyai alternatif-alternatif lain. Lagi pula manusia yang produktif, ber fungsi ganda, ia konsumen tetapi juga produsen.

Skala ekonomi memang menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan persaingan. Untuk dapat memasuki pasaran internasional, produk kita harus dapat bersaing, dan daya saing itu dimungkinkan jika ada kelebihan-kelebihan komparatif (*comparative advantages*), seperti dimilikinya sumber daya alam, tenaga kerja yang lebih murah, atau jika kedua-duanya tidak dimiliki, kemampuan teknologi yang dapat mengimbangi kekurangan-kekurangan itu. Di

luar itu semua, atau jika kelebihan-kelebihan komparatif itu tidak ada, maka daya saing di mungkinkan dan skala produksi yang lebih besar. Karena itu usaha untuk menerobos pasaran ekspor haruslah didukung oleh pasaran dalam negeri yang mantap. Dengan pasaran yang lebih luas, akan di peroleh keuntungan pada tingkat (margin) yang lebih besar yang memungkinkan investasi lebih lanjut, yang dapat meningkatkan efisiensi, yang dapat mempertinggi penguasaan teknologi, yang efek akhinya akan dirasakan oleh konsumen dalam bentuk produk yang bermutu lebih baik dengan harga yang lebih bersaing.

Pembinaan

Di samping perlindungan perlu selalu ada pembinaan, keduanya harus saling berkaitan, ibarat dua muka dan mata uang yang sama, dan dilakukan secara serempak sebagai satu kesatuan usaha dalam membangun kemampuan industri dalam negeri. Ini merupakan tugas penting di samping dan dunia usaha sendiri juga dan instansi instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan sektor produksi yang bersangkutan, maupun yang secara lintas sektoral diperlukan dukungannya, seperti perdagangan, perbankan, perpajakan, angkutan, dan sebagainya. Usaha produktif yang dilakukan kelompok menyebabkan terbukanya kesempatan kerja atau usaha bagi kelompok itu sendiri maupun masyarakat luas. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa satu usaha produktif yang dilakukan, misalnya peternakan atau industri kecil, tentu memerlukan usaha lain untuk menunjang keberhasilan usaha produktif pokok. Usaha-usaha lain dari usaha pokok inilah yang membuka kesempatan kerja baru (diversifikasi) dan peningkatan pendapatan warga masyarakat.

Dalam rangka ini harus diusahakan untuk mengurangi beban-beban yang tidak perlu, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang hanya menambah tingginya ongkos produksi. Menghilangkan in efisiensi dirasakan perlu guna meningkatkan sektor industri. Berkaitan dengan masalah ini perlu pula dipertimbangkan strategi industrialisasi di tahun-tahun yang akan datang, yang di samping memanfaatkan

pasaran dalam negeri (in ward looking) yang sekarang ini masih dikuasai oleh impor dengan menggantikannya dengan produksi sendiri (import substitution), juga perlu lebih memberi penekanan kepada pengembangan industri yang berlandaskan pada sumber daya yang banyak kita miliki, terutama sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan demikian maka selain lebih besar kita memperoleh nilai tambah, juga produksi kita akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih besar (competitive edge).

Dalam rangka pembinaan ini pula, sungguh penting pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung peningkatan kemampuan produksi dalam negeri. Apabila kita berbicara mengenai penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi serta peningkatan mutu, maka kita berbicara mengenai manusia yang mengelola, mengendalikan, dan melaksanakan keseluruhan proses produksi. Kenyataan menunjukkan bahwa justru di sinilah letaknya salah satu kelemahan kita. Sebagai gambaran, angkatan kerja di sektor industri dua pertiga di antaranya tidak pernah menginjak bangku sekolah atau menamatkan Sekolah Dasar. Yang pernah mengikuti sekolah kejuruan hanya sekitar 4,2%, sedangkan yang pernah bersekolah di perguruan tinggi 0,6%.

Dengan keadaan seperti ini jelas tidak mungkin industri kita dapat menyamai tingkat kemampuan industri di negara-negara yang lebih maju. Kelangkaan tenaga-tenaga yang ahli dan terampil ini sangat dirasakan misalnya ketika beberapa waktu yang lalu kita membangun proyek proyek besar secara serentak, seperti kilang kilang minyak dan LNG, pabrik-pabrik pupuk, pabrik-pabrik semen, pabrik-pabrik gula, dan sebagainya. Jangankan ahli-ahli dalam bidang-bidang pengetahuan tinggi, tenaga-tenaga untuk pekerjaan-pekerjaan menengah saja kita rasakan sangat kurang seperti tukang las, operator alat-alat besar dan sebagainya. Akibatnya maka bersamaan dengan pembangunan proyek-proyek tersebut berdatanganlah pekerja-pekerja dan Korea, Taiwan, Philipina, dan sebagainya. Dan sini jelas tampak bahwa pengembangan sumber daya manusia kita, ketinggalan jauh di bandingkan dengan laju pembangunan itu sendiri.

Maka perhatian yang layak harus diberikan pada peningkatan program-program pendidikan dan latihan yang diarahkan Untuk menghasilkan manusia-manusia pembangunan yang cakap dan terampil. Program SMK yang di kembangkan pada dewasa ini adalah salah satu jalan keluar yang baik. Tentunya tidak terbatas pada program SMK juga perlu dipikir jangka waktu lima tahun ke depan membuat Poltek guna memberikan kesempatan pada para lulusan SMK agar mempunyai ketrampilan lebih. Tentu saja harus ada kelenturan kebijakan bahwa Poltek ini jam kuliahnya tidak pagi tetapi siang/sore agar para lulusan SMK yang sudah bekerja bisa mengikuti kuliah.

Berbagai negara bangsa, terus mencari dan mengembangkan anak-anak mudanya yang memiliki talenta unggul, untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam berbagai perusahaan multinasional, orang-orang muda dengan talenta unggul diproyeksikan menduduki posisi penting untuk pengembangan teknologi masa depan. Kita perlu mencari dan mengembangkan anak-anak bangsa kita yang memiliki talenta istimewa. Sangat banyak anak-anak cerdas yang terbatas sekolahnya karena keterbatasan kemampuan ekonomi orang tuanya. Cukup menggembirakan, dalam jumlah kecil telah muncul beberapa yang berprestasi dalam Olimpiade Science Internasional. Tapi yang perlu kita cari dan asah, jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Amerika Serikat pada tahun 2003, meskipun masih mendominasi nobel bidang eksakta, mulai khawatir karena jumlah insinyur muda AS yang siap bekerja di perusahaan multinasional AS hanya 540.000 orang; kurang dari kebutuhannya. Sementara China memiliki stok sekitar 160.000 orang insinyur muda yang siap bekerja di perusahaan multinasional. Singapura, memiliki 10,9% populasi di bawah 24 tahun yang menyanggah gelar di bidang eksakta; sedikit di bawah Korea Selatan yang memiliki 11,1%. Singapura dan Korea Selatan melampaui AS yang hanya memiliki 5,7% populasi di bawah 24 tahun yang telah menyanggah gelar di bidang eksakta.

Terbatasnya anggaran adalah salah satu kendala yang kita hadapi. Menurut UNDP, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, anggaran yang diperlukan bagi setiap siswa SD adalah Rp. 1,7 juta/tahun dan untuk SMP Rp. 2,4 juta/tahun. Pada tahun 2006,

anggaran yang tersedia bagi 33, juta siswa SD dan SMP hanya Rp. 600.000,-/siswa SD/tahun dan Rp.800.000,-/siswa SMP/tahun. Menurut majalah "The Economist", pada tahun 2005, anggaran belanja penyelenggaraan Perguruan Tinggi di seluruh dunia mencapai 300 miliar dollar AS, atau 1% produk ekonomi dunia; sedang Indonesia hanya 0,13% PDB kita. Pada tahun 2006, biaya yang disediakan untuk setiap mahasiswa di AS adalah Rp. 200 juta/tahun; Jepang 108 juta/tahun; Eropa Rp. 81 juta/tahun; sementara Indonesia dengan 1 juta mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan 3 juta Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta hanya Rp. 6 juta/mahasiswa/tahun. Di era sekarang, tinggi rendahnya, harkat, derajat dan martabat suatu bangsa semakin diukur dari tingkat, kesejahteraan dan peradabannya. Karenanya, peningkatan standar hidup dan kualitas manusia Indonesia perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah, oleh masyarakat, oleh masing-masing keluarga, dan oleh orang per orang.

Sukses suatu bangsa adalah buah kerja keras yang cerdas terarah. Amerika Serikat yang di masa lalu mampu memprediksi kebutuhan dunia akan teknologi informasi, melakukan persiapan yang matang di lembaga-lembaga pendidikan dan ekonominya; sekarang menikmati posisi sebagai pemasok utama kebutuhan IT dunia. India sukses dengan pembangunan yang bertema, dengan tingkat pemerataan yang tinggi dan kemandirian yang besar. Rakyat India memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari makanan, pakaian, mobil, traktor, pesawat tempur, dan lain-lain, buatan India sendiri, walau kurang bagus. Kondisi itu menumbuhkan kegiatan ekonomi yang besar. RRC tahun 2006 sangat berbeda dengan RRC tahun 60-an, walau tetap, menyatakan dirinya Negara Komunis, mengambil langkah-langkah yang paradoksal dengan konsep komunis, tanpa menimbulkan gejolak yang mengindikasikan kematangan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Azis, I. J., 1994, *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Penerapannya di Indonesia*. Jakarta, LP-FEUI.
- Basri, M. C., 2002, "Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita". *Kompas*, 25 November.
- Basri, Faizal, 2004, *Perekonomian Indonesia*; UI , Jakarta.
- Berry, A., E. Rodriquez, dan H. Sandeem, 2001, "Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3): 363-384.
- Dumairy, 1996: *Perekonomian Indonesia*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Hill, H., 1996, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta, PAU-UGM dan Tiara Wacana.
- Kompas, 2001, "Memupuk UKM, Menuai Pemulihan Ekonomi". 14 Desember 2001.
- Kompas, 2006, "Daya Saing Industri Kritis Tanpa Perbaikan", 15 February 2006.
- Kwik Kian Gie: "Pidato Hari Kebangkitan Nasional 2003, Jakarta.
- Kuncoro, M., 2007, *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*" Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prawiro, R, 1998. *Indonesia Struggle For Economic Development: Pragmatism in Action*. Oxford University Press. Oxford.
- Sastrosoenarto, Hartato, 2006. *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. PT. Shortcut Gagas Imaji. Jakarta.

Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto, 2003, "Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 39 No 1, 29-50.

Surabaya, 20 Mei 2009

Tulisan ini dari hasil "perenungan dan pengamatan" dari hamba Allah yang memimpikan perubahan dari Negara Tercinta ini. Semoga pemikiran dan gagasan menjadikan api penyulut membangkitkan rasa nasional guna meningkatkan kemandirian bangsa.